



Pengakuan APP/Sinarmas mengenai keterhubungannya dengan perusahaan-perusahaan bermasalah

Tujuh fakta yang (malah) terungkap melalui laporan Asia Pulp & Paper

Mei 2019

KOALISI ANTI MAFIA HUTAN



Pada 15 Maret 2019, Asia Pulp & Paper APP/Sinar Mas Group (selanjutnya disebut APP/Sinar Mas) merilis ringkasan eksekutif dari laporan berjudul “*APP Assessment on its Links with Industrial Forest Plantations in Indonesia*”. Asesmen ini diinisiasi pada Juni 2018, setelah rangkaian pemberitaan media dan laporan NGO terkait dengan:

- Hubungan kepemilikan dan manajemen antara APP/Sinar Mas dan paling tidak 24 perusahaan pemasok kayu yang sebelumnya disebut APP/Sinar Mas “independen”; dan
- Keterkaitan dan/atau afiliasi rantai pasokan perusahaan kehutanan yang terlibat dalam deforestasi, perusakan lahan gambut, dan/atau kebakaran hutan.

Menyikapi laporan tersebut, Koalisi Anti Mafia Hutan telah mempersiapkan tujuh (7) tanggapan atas Ringkasan Eksekutif laporan APP/Sinar Mas.

1. Ringkasan Eksekutif disusun oleh APP/Sinar Mas, bukan dari laporan auditor independen.

Sembilan bulan lalu, Mei 2018, *Associated Press* meliput ultimatum Forest Stewardship Council (FSC) agar APP “mengakui” setelah memperoleh bukti bahwa APP/Sinar Mas “memiliki keterlibatan di balik layar dan pengaruh signifikan atas pemasok kayu yang terkait dengan kebakaran hutan dan deforestasi.”¹ Saat itu, *APP berjanji* “melibatkan auditor pihak ketiga untuk meninjau semua kepemilikan saham semua bisnis kehutanan di Indonesia untuk menentukan jika APP terlibat dalam praktik bisnis yang memicu konflik kepentingan.”²

Ringkasan Eksekutif terbaru yang dirilis APP tersebut bukanlah laporan auditor independen. APP/Sinar Mas pun tidak memberikan indikasi apakah laporan auditor tersebut kelak akan dibuka ke publik.³ Ringkasan Eksekutif tersebut hanya menjelaskan bahwa kantor akuntan yang namanya tidak disebutkan tetapi tergolong sebagai “*Big Four*” telah mengambil sampel data untuk diverifikasi yang hasil akhirnya belum disampaikan ke APP. Tanpa membuka laporan auditor, Ringkasan Eksekutif tersebut tidak ada artinya, bahkan bisa dipandang sebagai cara APP/Sinar Mas menghindari analisis independen terhadap jaringan entitas perusahaannya yang sedemikian kompleks, yang patut diduga dikendalikan oleh penerima manfaat (*beneficial owners*) yang sama.

Gambar 1. Kop laporan APP Sinarmas.



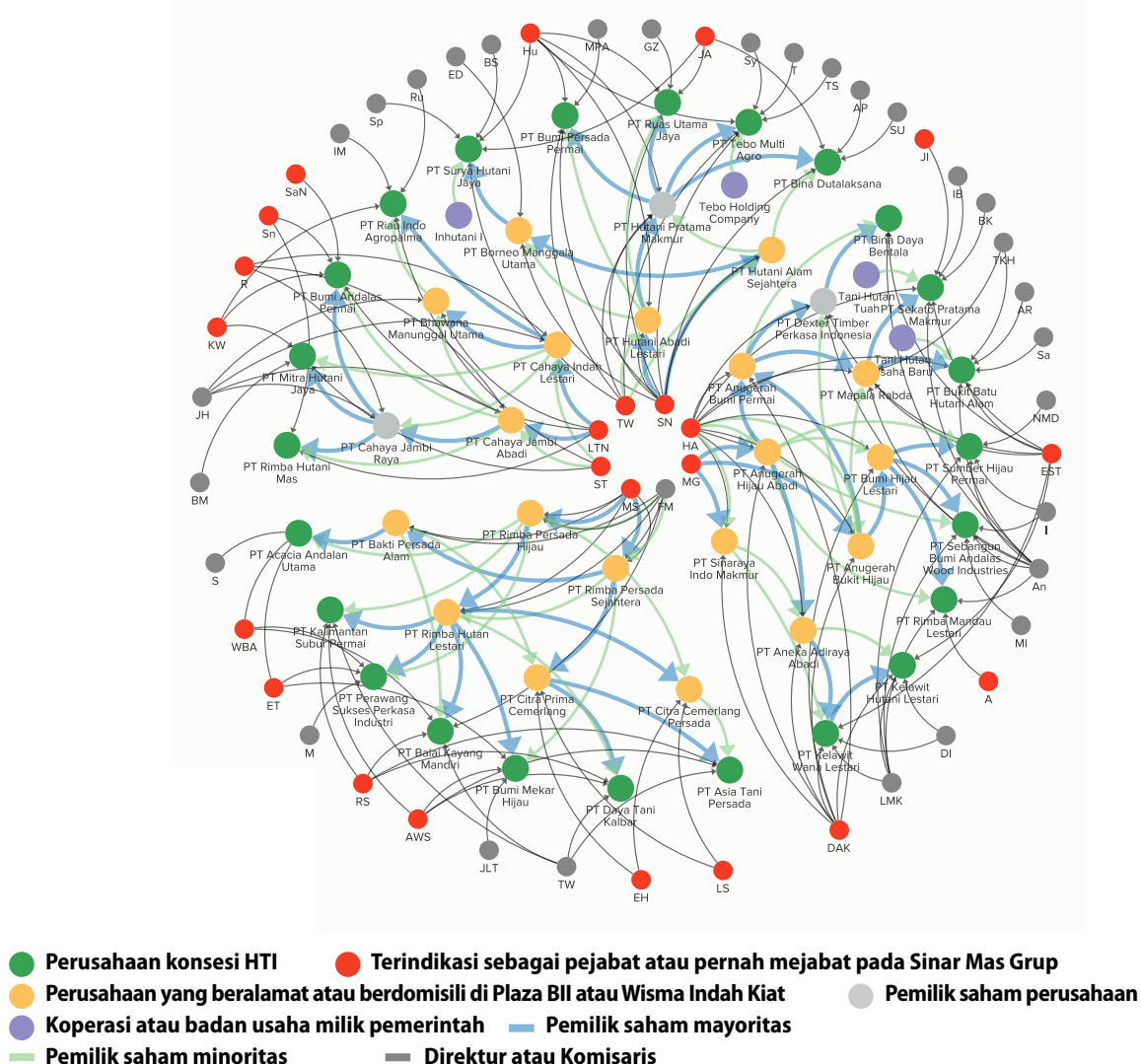
Sumber: APP/Sinarmas. 2019. “APP Assessment on its link with industrial forest plantations in Indonesia.” Executive Summary. March 15. <http://www.fcpmonitoring.com/Pages/OpenPDF.aspx?id=1422>.

2. APP/Sinar Mas tidak menyangkal klaim bahwa karyawan dan/atau mantan karyawannya merupakan pemilik saham, direktur, dan komisaris dari perusahaan pemasok bubur kayu yang sebelumnya digambarkan APP sebagai “independen”.

Ringkasan Eksekutif tersebut disampaikan APP/Sinar Mas tampaknya sebagai tanggapan terhadap liputan *Associated Press* dan juga laporan *Koalisi Anti Mafia Hutan* yang menampilkan setidaknya 24 dari 27 pemasok APP/Sinar Mas yang disebut “independen” ternyata memiliki keterhubungan kepemilikan atau kepengurusan dengan APP/Sinar Mas.⁴ Namun demikian, dalam Ringkasan Eksekutif, APP/Sinar Mas tidak menyangkal adanya keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan karyawan atau mantan karyawan di dalam entitas APP dan/atau Sinar Mas. Pun tidak ada sanggahan perihal adanya kemungkinan struktur atas nama (*nominee structures*) pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain itu, APP/Sinar Mas tidak mengindikasikan melarang penggunaan *nominee structures* dalam rantai pasokannya, yang telah ditinjau oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Peraturan di Indonesia secara tegas juga melarang kepemilikan saham *nominee*.⁵ Menurut Undang Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, konsekuensi dari perjanjian kepemilikan saham *nominee*, dinyatakan batal demi hukum. Forest Stewardship Council telah melayangkan surat teguran kepada APP terkait praktik tersebut, tertanggal 28 Mei 2018, menyatakan bahwa “pola penggunaan proksi untuk mengontrol operasi tanpa kepemilikan resmi sangatlah mengkhawatirkan.”⁶

Gambar 2. Struktur Pemegang Saham, Komisioner, dan Direktur 24 pemasok “independen” APP Sinarmas, per 16 April 2018.

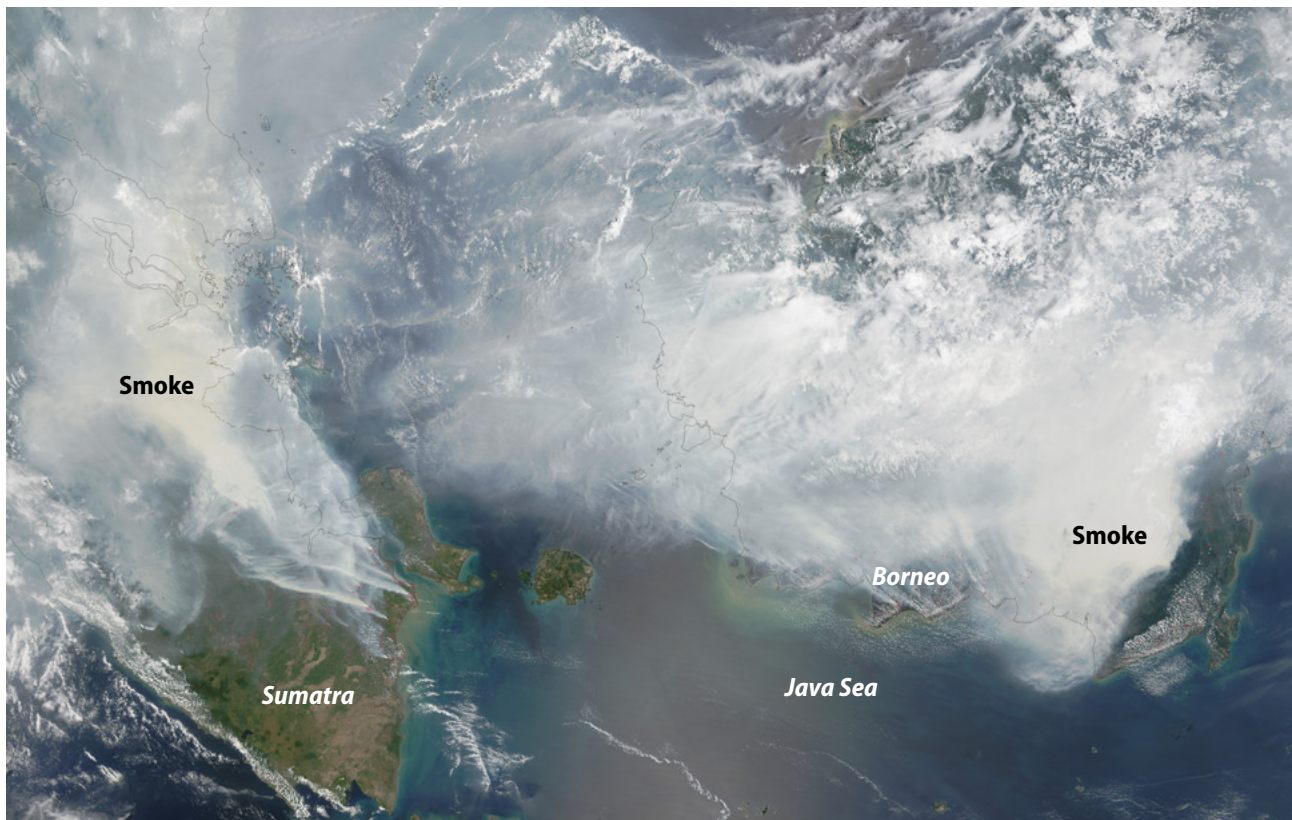


Sumber: Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018, Tapi, Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia, 30 Mei. Jakarta, Indonesia.

3. APP mengakui bahwa empat pemasok kayu yang terlibat dalam kebakaran hutan 2015 merupakan “mitra” dengan pengaruh signifikan, termasuk kemungkinan adanya hubungan kepemilikan dan pengelolaan.

Pada 2015, bencana kebakaran **membumihanguskan area** dalam empat konsesi hutan tanam industri (HTI) yang dikelola oleh PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries (SWI), PT Bumi Andalas Permai (BAP) dan PT Rimba Hutani Mas (RHM) – semuanya merupakan pemasok jangka panjang untuk APP.⁷ Terkait hal ini, APP bersikukuh bahwa empat perusahaan pemasok tersebut “**dimiliki dan beroperasi secara independen**.”⁸ Upaya ini dicurigai sebagai cara APP/Sinar Mas untuk mengelak dari tanggung jawab saat Badan Lingkungan Nasional Singapura mengeluarkan “*Preventative Measures Notices*” dan mulai **menyelidiki** empat pemasok tersebut terkait kemungkinan pelanggaran terhadap *Transboundary Haze Pollution Act*.^{9,10} Berlawanan dengan klaim sebelumnya, kini APP mengakui memiliki “**pengaruh signifikan**” terhadap pemasok-pemasok tersebut, termasuk kemungkinan adanya kesamaan pemilik saham dan personil dalam manajemen, seperti Direksi dan atau Komisaris.¹¹

Gambar 3. Observasi asap pada saat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan menggunakan satelit Tera NASA, September dan Oktober 2015.

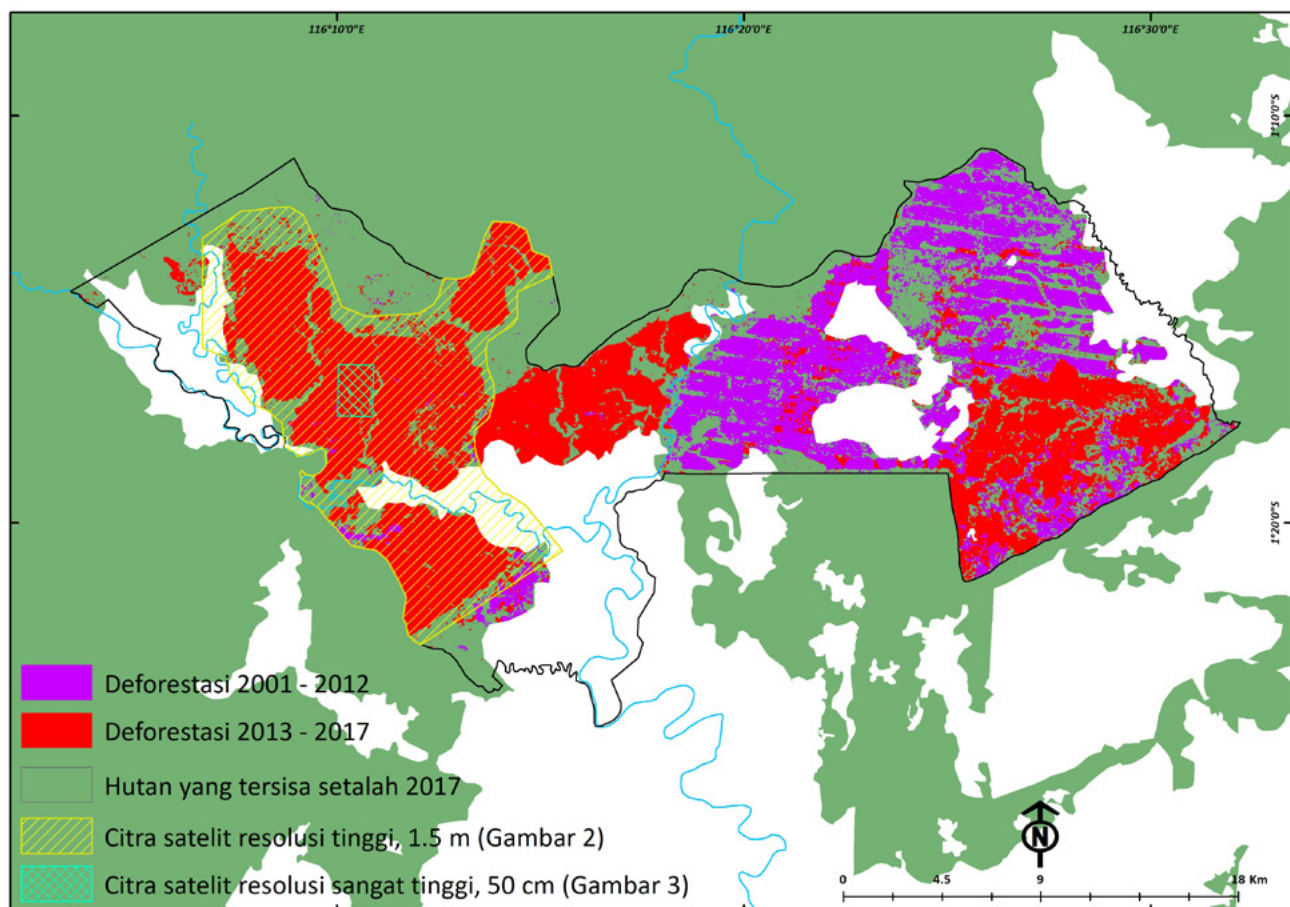


Sumber: Jeff Schmaltz NASA's LANCE/EOSDIS Rapid Response, Adam Voiland, 2015, “Seeing through the smoky pall: Observations from a grim Indonesian fire season.” NASA Earth Observatory, Desember 1. <https://earthobservatory.nasa.gov/features/IndonesianFires>

4. APP mengakui membeli kayu dari PT Fajar Surya Swadaya, pemasok dari Kalimantan Timur yang melakukan deforestasi.

Agustus 2018, **Koalisi Anti Mafia Hutan** melaporkan bahwa baik APP maupun APRIL telah melanggar komitmen *zero-deforestation*-nya dengan membeli kayu dari PT Fajar Surya Swadaya (FSS), pemegang konsesi yang menebang hampir 20.000 hektar hutan alam sejak 2013 tanpa menunjukkan bukti telah melakukan penilaian *High Conservation Value* (HCV) dan *High Carbon Stock* (HCS).¹² Mengutip laporan resmi rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) tahun 2017, laporan tersebut mengungkap, PT Indah Kiat Pulp & Paper membeli sebanyak 24.863 m³ kayu tanaman dari FSS. Selain itu, satu pabrik kayu serpih (wood chip mill) di Kalimantan Timur yang terafiliasi dengan APP, PT Sarana Bina Semesta Alam, juga membeli kayu dari FSS sebanyak 14.726 m³ (bila digabung, sekitar 1.000 truk).

Gambar 4. Deforestasi pada rentang 2001–2007 dan tutupan hutan alam tersisa dalam konsesi HTI PT Fajar Surya Swadaya di Kalimantan Timur.



Sumber: Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018, APP and APRIL violate zero-deforestation policies with wood purchases from Djarum Group concessions in East Kalimantan, lihat <https://www.panda.org/?333258/APP-and-APRIL-violate-zero-deforestation-policies-with-wood-purchases-from-Djarum-Group-concessions-in-East-Kalimantan>, diakses pada 11 April 2019.

Dalam Ringkasan Eksekutif yang baru saja dirilis, APP/Sinar Mas kembali menegaskan klaim sebelumnya bahwa pembelian kayu dari FSS sebatas “uji coba pengiriman kayu” dan bahwa “setelah verifikasi lapangan lebih lanjut, APP [...] menemukan adanya konversi hutan di dalam area konsesi FSS [...] dan] bahwa area yang digambarkan FSS sebagai non-HCS sebenarnya area HCS.” APP/Sinar Mas mengatribusikan pembelian kayu dari FSS sebagai “**kesalahan administrasi**” dan mengklaim bahwa “tidak ada serat kayu dari pengiriman tersebut yang memasuki pasokan produksi APP”, meski mengakui sebagian kayu tersebut digunakan untuk palet dan bahan bakar di industri.¹³

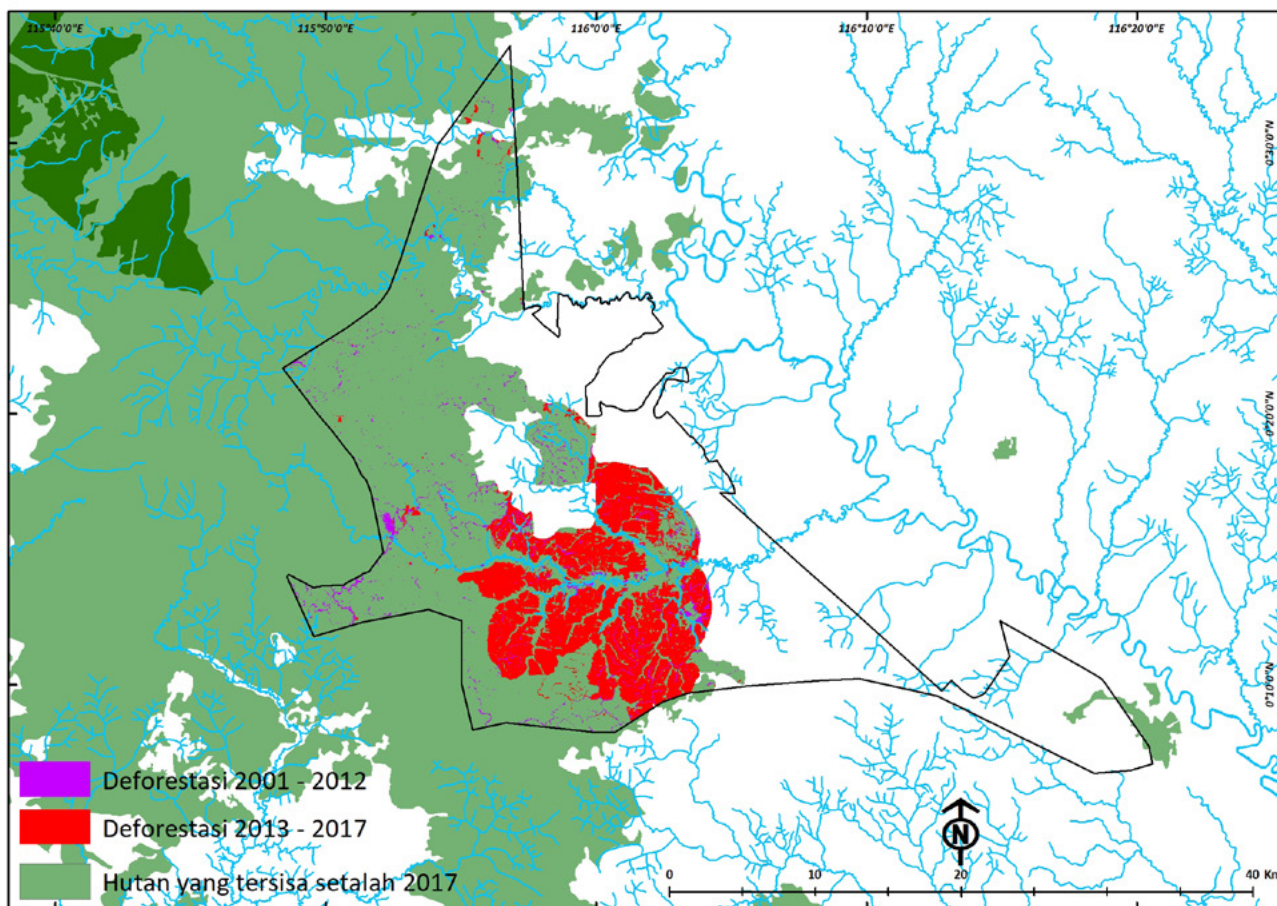
Temuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang pengawasan komitmen keberlanjutan APP dan apakah APP akan mengakui keterlibatannya dalam deforestasi seandainya wartawan dan NGO tidak mengungkapkannya.

5. Berkaitan dengan bantahan sebelumnya, APP mengakui hubungan kemitraan dengan PT Sarana Bina Semesta Alam, pabrik serpih kayu di Kalimantan Timur, yang telah menerima kayu dari hasil deforestasi hutan alam.

Koalisi Anti Mafia Hutan pada Agustus 2018 juga mengungkap PT Sarana Bina Semesta Alam (SBSA), pabrik kayu serpih di Kalimantan Timur yang terafiliasi dengan APP, menerima kayu alam melalui pembukaan lahan (*land clearing*) PT Silva Rimba Lestari, salah satu pemasok lainnya.¹⁴ Awalnya, APP **menyanggah** kepemilikan atau kendali atas SBSA.¹⁵ Kini, melalui Ringkasan Essekutif tersebut, APP mengakui memiliki “pengaruh signifikan” terhadap “rekanannya” SBSA, yang secara historis **mengekspor serpih kayu** ke pabrik pulp APP lainnya di Cina Hainan Jinhai Pulp Mill.¹⁶ APP bahkan mengonfirmasi bahwa SBSA membeli kayu dari SRL, pemasok yang patut diduga menghancurkan hutan alam dalam konsesinya di Kalimantan Timur, meski menyebut bahwa kayu itu dipakai hanya untuk “**pembangunan infrastruktur**”.¹⁷

Hal-hal seperti ini tentu saja mengundang pertanyaan mendasar perihal pengawasan (pelaksanaan) komitmen keberlanjutan APP sekaligus mempertontonkan upaya APP mengelak dari tanggung jawab atas deforestasi yang dilakukan atau melibatkannya.

Gambar 5. Deforestasi dan tutupan hutan tersisa dalam konsesi HTI PT Silva Rimba Lestari di Kalimantan Timur.



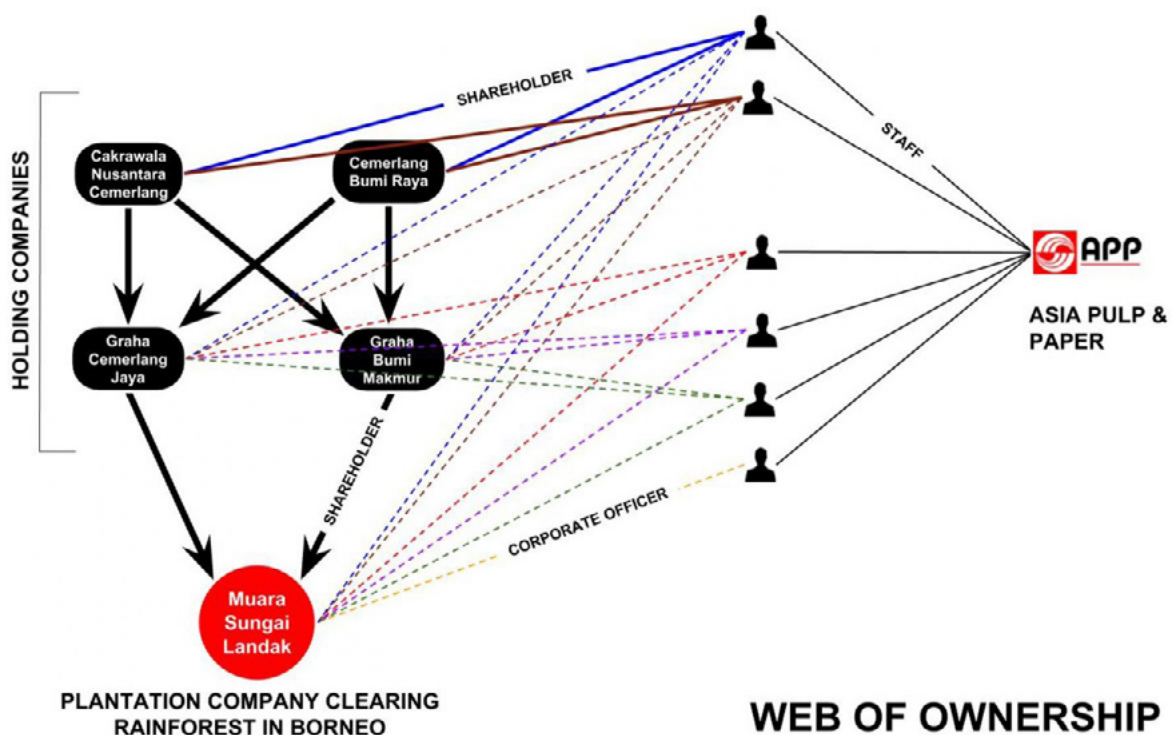
Sumber: Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018, APP and APRIL violate zero-deforestation policies with wood purchases from Djarum Group concessions in East Kalimantan, lihat <https://wwf.panda.org/?333258/APP-and-APRIL-violate-zero-deforestation-policies-with-wood-purchases-from-Djarum-Group-concessions-in-East-Kalimantan>, diakses pada 11 April 2019.

6. Kepemilikan PT Muara Sungai Landak (MSL), perusahaan perkebunan pelaku deforestasi dan penghancuran lahan gambut, diatribusikan kepada eks-karyawan. Bahkan Sustainability Director APP saat ini merupakan mantan pemilik saham.

Investigasi *Associated Press* yang diterbitkan Desember 2017 menemukan bahwa PT Muara Sungai Landak (MSL), satu perusahaan HTI di Kalimantan Barat yang terhubung dengan APP, menebang habis hutan alam dan menghancurkan lahan gambut di Kalimantan Barat sejak 2014.¹⁸ Menyikapi pemberitaan AP tersebut, APP melakukan investigasinya sendiri dan “menemukan bahwa tiga pemilik saham MSL mempunyai hubungan dengan APP.”¹⁹ Ringkasan APP menjelaskan bahwa “Dua [pemegang saham MSL] merupakan eks-karyawan APP terakhir bekerja pada Oktober 2015 dan November 2015 . . . [dan pada saat diinvestigasi oleh APP], satu orang masih bekerja di APP dan belum mengungkapkan soal kepemilikan saham serta posisinya di dalam MSL” (dan kemudian dipecat).

Investigasi susulan oleh *Mongabay*, terbit pada Juli 2018, menemukan kaitan yang jauh lebih erat dan dalam antara MSL dengan APP/Sinar Mas, dibanding dengan yang diakui APP.²⁰ Dua orang mantan karyawan APP yang diwawancarai oleh *Mongabay* mengatakan bahwa manajemen perusahaan menggunakan nama mereka pada akta pendirian perusahaan [. . .] Salah seorang mengatakan bahwa dia telah menerima bayaran bulanan sebagai bentuk kompensasi, dan karena itu ia takut memprotes karena terancam kehilangan pekerjaannya.”²¹ Menurut investigasi ini, “wawancara dengan mantan karyawan APP juga mengindikasikan bahwa upaya mengaburkan relasi kepemilikan dikoordinasikan dengan konglomerat.”²² Penelisikan Koalisi Anti Mafia Hutan bahkan menemukan, berdasar profil perusahaan pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, bahwa *Director of Sustainability and Stakeholder Engagement* APP saat ini – hingga 2012 – adalah pemegang saham minoritas MSL. Ketika itu dia juga tercatat sebagai karyawan di Sinar Mas Forestry.

Gambar 6. Relasi antara PT Muara Sungai Landak dengan staf APP.



Sumber: Philip Jacobson, 2018, Revealed: Paper giant's ex-staff say it used their names for secret company in Borneo, lihat <https://news.mongabay.com/2018/07/revealed-paper-giants-ex-staff-say-it-used-their-names-for-secret-company-in-borneo/>, diakses pada 11 April 2019.

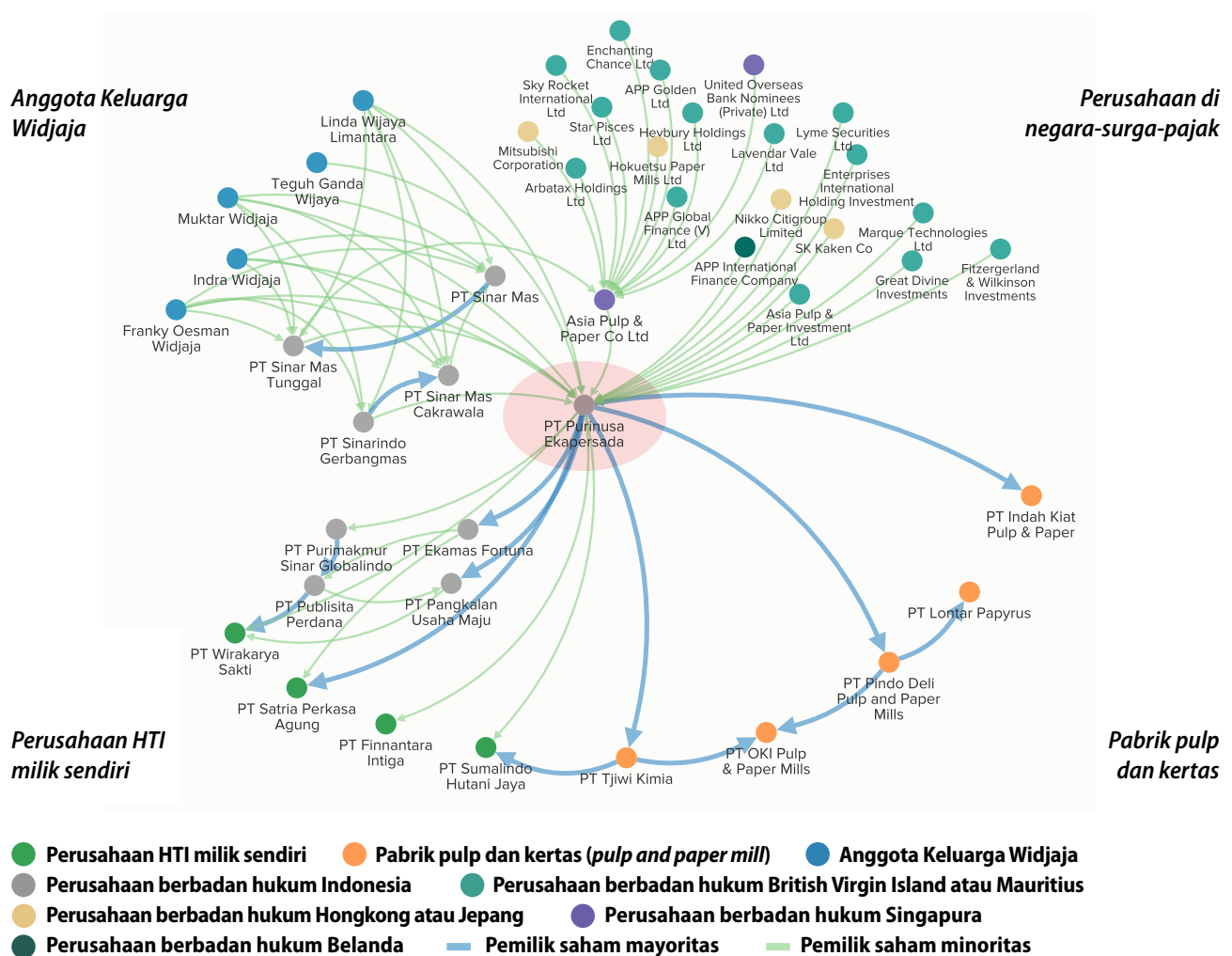
7. Daftar perusahaan yang dideklarasikan APP tidak mencakup keseluruhan struktur perusahaan APP/Sinar Mas.

Ringkasan Eksekutif yang dirilis APP/Sinar Mas berisi daftar “Perusahaan APP” termasuk: enam (6) perusahaan yang diidentifikasi sebagai “*Pulpwood Supplier* (Forestry Operation)”; tiga (3) perusahaan yang diidentifikasi sebagai “*Pulp Mill/Integrated Pulp & Paper Mill*”; dan empat (4) perusahaan yang diidentifikasi sebagai “*Paper Mill*”. Daftar tersebut tidak memberikan penjelasan jelas kenapa sejumlah perusahaan yang secara gamblang terafiliasi dengan APP dan Grup Sinar Mas melalui keterkaitan kepemilikan dan/atau pengelolaan, yang sebagainya telah dicantumkan Koalisi Anti Mafia Hutan dalam **laporannya yang terbit 2018 lalu**, tidak diklasifikasi sebagai bagian dari “Perusahaan APP”.²³

Satu nama penting yang tidak tercatat adalah PT Purinusa Ekapersada, **pemegang merek** dari Asia Pulp & Paper.²⁴ Purinusa Ekapersada merupakan perusahaan induk mengonsolidasi perusahaan APP lainnya, menurut dokumen registrasi perusahaan yang dianalisis dalam **laporan Koalisi Anti Mafia Hutan pada 2018**.²⁵

Dengan kata lain, pengungkapan APP/Sinar Mas perihal “perusahaan-perusahaan APP” tidak memenuhi sepenuhnya **ultimatum Forest Stewardship Council** pada Mei 2018 yang mendesak APP/Sinar Mas untuk “mengungkap seluruh struktur perusahaan APP termasuk pemasok kayunya, perusahaan cangkang, serta perusahaan *offshore* dan kepemilikan sebenarnya, paling lambat pada 11 Juni 2018.”²⁶

Gambar 7. Peta Pemegang Saham PT Purinusa Ekapersada, data 16 April 2018.



Sumber: Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018, *Tapi, Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia*, 30 Mei. Jakarta, Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, Koalisi Anti-Mafia Hutan mengulangi rekomendasi serupa yang diterbitkan pada Mei 2018, yang mendesak:

Asia Pulp & Paper dan Grup Sinar Mas untuk:

- memenuhi keharusan dalam Peraturan Presiden 13/2018 agar mendeklarasikan penerima manfaat semua perusahaan pemasok APP;
- membuka nama, pemegang saham yang sah, serta penerima manfaat dari semua entitas perusahaan yang dikendalikan, terafiliasi dengan, dan/atau terhubung dengan APP dan Grup Sinar Mas di semua yurisdiksi secara global;
- merilis laporan finansial yang sudah diaudit terhadap semua perusahaan HTI yang memasok serat kayu ke pabrik *pulp* APP di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia untuk:

- memberlakukan *single identity number* (SIN) untuk menutup celah potensial bagi semua orang yang ingin menyalahgunakan informasi;

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk:

- bekerjasama dengan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 40/2017 tentang Perusahaan Terbatas, untuk menegaskan tanggung jawab perusahaan induk, perusahaan anak, dan grup perusahaan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:

- mewajibkan APP dan Sinar Mas untuk membuka struktur perusahaan penerima manfaat dari semua perusahaan pemegang konsesi HTI dan izin kehutanan lainnya di bawah kendali grup tersebut;
- mewajibkan semua penerima manfaat dari semua perusahaan yang terafiliasi dengan APP dan Sinar Mas untuk mengafirmasi tanggung jawab utama mereka dalam memastikan bahwa aset kehutanan dan lahan gambut mereka dikelola sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam izin usaha;
- mewajibkan APP dan Grup Sinar Mas agar segera merilis rencana jangka panjang pasokan kayu yang kredibel dan dapat diverifikasi bagi setiap pabrik *pulp*-nya di Indonesia;
- tidak mengalokasikan izin HTI baru sebagai *land swap* bagi perusahaan yang berafiliasi atau terhubung dengan Grup Sinar Mas sampai dilakukan inspeksi terhadap kemungkinan praktik penghindaran pajak dan monopsoni oleh Grup Sinar Mas secara keseluruhan;

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak untuk:

- mengaudit kinerja pembayaran pajak perusahaan dan perorangan dari perusahaan, manajemen, pemilik saham yang terafiliasi dengan Sinar Mas atau APP;
- meninjau perjanjian pasokan kayu dan kontrak lainnya antara APP dan Grup Sinar Mas dan perusahaan pemasok kayu yang diaku APP untuk menilai apakah pembelian pihak terkait dilakukan secara wajar;

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk:

- mengharuskan perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Sinar Mas untuk mendeklarasikan penerima manfaatnya seperti diatur dalam Peraturan Presiden 13/2018;
- mengevaluasi keberadaan pemilik saham yang diduga sebagai *nominee owners* di perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Sinar Mas;
- memperbaiki sistem pembentukan entitas legal agar dapat mengidentifikasi gejala struktur kepemilikan *nominee*, maupun perusahaan yang termasuk di dalam grup kepemilikan tunggal, yang memiliki struktur kepemilikan tumpang tindih, dan/atau para karyawannya memiliki banyak jabatan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk:

- melakukan audit penuh terkait kepatuhan dan validitas informasi yang dirilis secara publik oleh perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Sinar Mas;

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk:

- menginspeksi struktur bisnis Grup Sinar Mas untuk menilai indikasi struktur kepemilikan yang tumpang tindih, integrasi vertikal, serta potensi transfer harga dari pasokan serat kayu kepada industri, yang dilarang Undang-Undang 5/1999;
- menindak secara tegas perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran;

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk:

- menganalisis potensi risiko pencucian uang oleh perusahaan yang terhubung ke Grup Sinar Mas, terutama melalui/oleh/dengan perusahaan *offshore*.

Sumber

1. Stephen Wright, 2017, AP Exclusive: *Pulp giant tied to companies accused of fire*, lihat <https://apnews.com/fd4280b11595441f81515daef0a951c3>, diakses pada 11 April 2019
2. APP Sinarmas, 2018, *APP statement on NGO allegation regarding APP suppliers and corporate structure*, lihat <https://www.asiapulppaper.com/news-media/press-releases/app-statement-ngo-allegations-regarding-app-suppliers-and-corporate-structure>, diakses pada 11 April 2019
3. APP Sinarmas, 2018, *APP statement on NGO allegation regarding APP suppliers and corporate structure*, lihat <https://www.asiapulppaper.com/news-media/press-releases/app-statement-ngo-allegations-regarding-app-suppliers-and-corporate-structure>, diakses pada 11 April 2019
4. Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018, Tapi, Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia, 30 Mei. Jakarta, Indonesia.
5. Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
6. Stephen Wright, 2018, *Forest watchdog sends ultimatum to Indonesian paper giant*, lihat <https://www.apnews.com/a88303a0659c467e8b02d876ddcee18f>, diakses pada 11 April 2019.
7. Hutan Kita Institute, 2015, *78% of Burned Area Inside Forest Concessions in South Sumatera is in Concessions of Suppliers to Asia Pulp and Paper (APP)*, lihat <http://hutaninstitute.or.id/70-burned-area-inside-forest-concessions-in-south-sumatra-links-to-app/>, diakses pada 11 April 2019

8. Joyce Lim, 2015, Asia Pulp & Paper: Suspended suppliers independently owned, *Straits Times*, December 25. <http://www.straitstimes.com/business/companies-markets/asia-pulp-paper-suspended-suppliers-independently-owned>.
9. David Fogarty, 2015, *APP's bottom line takes a hit from Indonesia plantation fires*, lihat <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/apps-bottom-line-takes-a-hit-from-indonesia-plantation-fires>, diakses pada 11 April 2019
10. Chanel News Asia, 2017, *2015 haze: NEA still investigating Asia Pulp and Paper Suppliers*, lihat <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/2015-haze-nea-still-investigating-asia-pulp-and-paper-suppliers-8771176>, diakses pada 11 April 2019
11. <http://www.fcpmonitoring.com/Default.aspx?lang=E>
12. Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018, *APP and APRIL violate zero-deforestation policies with wood purchases from Djarum Group concessions in East Kalimantan*, lihat <https://wwf.panda.org/?333258/APP-and-APRIL-violate-zero-deforestation-policies-with-wood-purchases-from-Djarum-Group-concessions-in-East-Kalimantan>, diakses pada 11 April 2019
13. <http://www.fcpmonitoring.com/Pages/OpenPDF.aspx?nid=200082>
14. Hans Nicholas Jong, 2018, *Report finds APP and APRIL violating zero-deforestation policies with wood purchases from Djarum Group concessions in East Kalimantan*, lihat <https://news.mongabay.com/2018/08/report-finds-app-and-april-violating-zero-deforestation-policies-with-wood-purchases-from-djarum-group-concessions-in-east-kalimantan/>, diakses pada 11 April 2019.
15. Asia Pulp & Paper, 2018, *APP response to AURIGA's allegations of deforestation in East Kalimantan*, lihat <https://www.asiapulppaper.com/fr/node/3255>, diakses pada 11 April 2019
16. Hans Nicholas Jong, 2018, *Report finds APP and APRIL violating zero-deforestation policies with wood purchases from Djarum Group concessions in East Kalimantan*, lihat <https://news.mongabay.com/2018/08/report-finds-app-and-april-violating-zero-deforestation-policies-with-wood-purchases-from-djarum-group-concessions-in-east-kalimantan/>, diakses pada 11 April 2019.
17. APP Sinarmas, *APP Assessment on its link with industrial forest plantations in Indonesia*, lihat <http://www.fcpmonitoring.com/Pages/OpenPDF.aspx?id=1422>, diakses pada 11 April 2019
18. Stephen Wright, 2017, *AP Exclusive: Pulp giant tied to companies accused of fire*, lihat <https://apnews.com/fd4280b11595441f81515daef0a951c3>, diakses pada 11 April 2019
19. APP Sinarmas, *APP Assessment on its link with industrial forest plantations in Indonesia*, lihat <http://www.fcpmonitoring.com/Pages/OpenPDF.aspx?id=1422>, diakses pada 11 April 2019
20. Philip Jacobson, 2018, *Revealed: Paper giant's ex-staff say it used their names for secret company in Borneo*, lihat <https://news.mongabay.com/2018/07/revealed-paper-giants-ex-staff-say-it-used-their-names-for-secret-company-in-borneo/>, diakses pada 11 April 2019
21. Philip Jacobson, 2018, *Revealed: Paper giant's ex-staff say it used their names for secret company in Borneo*, lihat <https://news.mongabay.com/2018/07/revealed-paper-giants-ex-staff-say-it-used-their-names-for-secretcompany-in-borneo/>, diakses pada 11 April 2019
22. Philip Jacobson, 2018, *Revealed: Paper giant's ex-staff say it used their names for secret company in Borneo*, lihat <https://news.mongabay.com/2018/07/revealed-paper-giants-ex-staff-say-it-used-their-names-for-secretcompany-in-borneo/>, diakses pada 11 April 2019
23. Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018, *Tapi, Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia*, 30 Mei. Jakarta, Indonesia.
24. Asia Pulp & Paper, 2016, *APP Sustainability Report 2016*, lihat https://www.asiapulppaper.com/system/files/app_sustainability_report_2016_web.pdf, diakses pada 11 April 2019.
25. Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018, *Tapi, Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia*, 30 Mei. Jakarta, Indonesia.
26. Stephen Wright, 2018, *Forest watchdog sends ultimatum to Indonesian paper giant*, lihat <https://www.apnews.com/a88303a0659c467e8b02d876ddcee18f>, diakses pada 11 April 2019.

Disclaimer

Laporan ini disusun berdasarkan informasi publik yang tersedia, yang diperoleh dari berbagai sumber sebagaimana disebutkan. Verifikasi independen terhadap sumber informasi tidak dilakukan, dan terhadap pendapat para penulis, sepenuhnya merupakan pendapat para penulis dan tidak dimaksud sebagai nasehat untuk pihak atau kepentingan tertentu.



Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Cover photo: Rainforest Action Network